

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi digital di era modern telah menjadi paradigma baru yang mendasar dalam tata kelola pemerintahan kontemporer, khususnya di sektor publik (Ummah Annisah, 2019). Implementasi *E-government* bukan sekadar upaya digitalisasi dokumen administratif, melainkan merupakan strategi strategis untuk menata ulang struktur pemerintahan agar lebih efisien dan efektif dalam membangun hubungan antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pelaku bisnis, dan instansi lainnya. Tujuan utama dari transformasi ini adalah mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pelayanan publik. Di Indonesia, urgensi tersebut telah diformalkan melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mengamanatkan integrasi proses bisnis pemerintahan melalui platform digital secara menyeluruh (Sumarhaeti, 2025).

Meskipun landasan regulasi telah tersedia, implementasi SPBE di Indonesia pada periode 2018–2024 menghadapi tantangan besar berupa fragmentasi sistem. Jumlah aplikasi pemerintahan meningkat pesat, namun banyak di antaranya tidak terintegrasi satu sama lain. Menyikapi hal ini, pemerintah pusat melalui Perpres No. 132 Tahun 2022 mulai mewajibkan daerah untuk melakukan konsolidasi

arsitektur digital. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam pengembangan desain *e-government* antar pemerintah daerah tingkat provinsi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa adopsi teknologi informasi di sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur teknis, tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor-faktor situasional non-teknis, seperti kompetisi politik, kinerja pemerintah daerah (Pemda), opini audit, dan karakteristik demografi (Hasnan et al., 2022).

Kompetisi politik diakui sebagai pendorong strategis dalam pengungkapan informasi publik. Secara teoretis, dalam lingkungan politik yang kompetitif, kepala daerah cenderung meningkatkan kualitas *e-government* sebagai sarana untuk menunjukkan kinerja yang transparan dan inovatif demi mendapatkan dukungan publik (R. D. Utami et al., 2017). Sebaliknya, minimnya kompetisi politik sering kali berkorelasi dengan rendahnya insentif pemerintah daerah untuk terbuka melalui platform digital. Kompetisi politik juga menjadi gambaran kapasitas manajerial organisasi; pemerintah daerah dengan rapor kinerja tinggi diasumsikan lebih siap dalam melakukan restrukturisasi sistem kerja manual menuju sistem berbasis elektronik yang lebih kompleks (Sihotang et al., 2025). Dalam sistem demokrasi, tingkat kompetisi politik dapat menciptakan tekanan bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.

Namun, terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kompetisi politik. Penelitian Daihade et al (2022) menunjukkan bahwa kompetisi politik berpengaruh signifikan terhadap penerapan *e-government* pada pilkada

kabupaten Sitaro tahun 2018. di mana semakin tinggi kompetisi, semakin besar dorongan untuk meningkatkan layanan berbasis teknologi. Sebaliknya, Oktavia dan Arza (2020) menyatakan bahwa kompetisi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan *e-government* pada pemerintah provinsi di Indonesia periode 2011–2018. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor politik tidak selalu tidak menjadi diterminan utama karena implementasinya juga dipengaruhi oleh kapasitas organisasi dan kesiapan infrastruktur. Selain faktor politik, Kinerja Pemerintah Daerah merupakan indikator penting yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Pemerintah daerah dengan kinerja yang baik umumnya memiliki kapasitas fiskal dan manajerial yang lebih besar dalam mengembangkan inovasi pelayanan berbasis teknologi. Andayani et al. (2024) dan Shabihah et al. (2025) menemukan bahwa kinerja pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap penerapan *e-government*. Namun, temuan berbeda disampaikan oleh Bambang et al. (2020) yang menyatakan bahwa kinerja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan *e-government* pada 33 provinsi di Indonesia periode 2014-2015.

Dari sisi akuntabilitas finansial, Opini Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan indikator kredibilitas pengelolaan keuangan. Adopsi *e-government* sering kali menjadi instrumen bagi daerah untuk memperbaiki sistem pengendalian internal agar mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Suharyono (2020) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap penerapan *e-government* pada 34 provinsi di Indonesia periode 2018–

2021. Namun, Wijaya (2022) menemukan hasil berbeda, yaitu opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan *e-government* pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua periode 2015–2017. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan perlunya pengujian lebih lanjut dalam konteks yang lebih luas

Faktor eksternal seperti Karakteristik Demografi (jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat pengangguran) juga memberikan tantangan tersendiri. Setiap provinsi dengan wilayah luas dan populasi besar memiliki tuntutan lebih tinggi terhadap efisiensi digital guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Yusrida & Susanto (2017) menemukan bahwa karakteristik demografi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan layanan *e-government*. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh Bambang et al. (2025) yang menggunakan pendekatan kuantitatif pada data 33 provinsi, di mana karakteristik demografi tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan hasil ini diduga disebabkan oleh perbedaan metode penelitian dan cakupan wilayah.

Untuk memberikan gambaran empiris mengenai kesenjangan implementasi tersebut, berikut disajikan data kinerja *e-government* berdasarkan Indeks SPBE terbaru:

1.1 Tabel kinerja e-government berdasarkan indeks SPBE

Peringkat	Provinsi	Kategori / Indeks SPBE	Fungsi & Penggunaan Utama
1	Jawa Tengah	Memuaskan (4,26)	Acuan Nasional & Integrasi Layanan (GovTech)

2	Jawa Barat	Sangat Baik (4,14)	Transformasi Digital Pelayanan Publik Nasional
3	Bali	Sangat Baik (4,07)	Optimalisasi Pariwisata & Layanan Berbasis TIK
4	DKI Jakarta	Sangat Baik (3,91)	Pusat Integrasi Data & Ekonomi Digital Kota
5	Jawa Timur	Sangat Baik (3,62)	Modernisasi Birokrasi & Inovasi Administrasi
6	Kalimantan Barat	Sangat Baik (3,58)	Peningkatan Aksesibilitas Wilayah Perbatasan
7	DI Yogyakarta	Sangat Baik (3,52)	Pengembangan Smart City & Budaya Digital
8	Banten	Baik (3,45)	Perbaikan Transparansi Tata Kelola Daerah
9	Nusa Tenggara Barat	Baik (3,40)	Digitalisasi Sektor Publik & UMKM
10	Sumatera Barat	Baik (3,38)	Penguatan Kebijakan Internal Berbasis Data
11	Jambi	Baik (3,31)	Efisiensi Administrasi Pemerintah Daerah
12	Sumatera Selatan	Baik (3,26)	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Digital
13	Riau	Baik (3,13)	Standardisasi Infrastruktur Jaringan Intra
14	Kepulauan Riau	Baik (3,11)	Layanan Publik Terpadu Lintas Kepulauan
15	Sulawesi Selatan	Baik (3,09)	Akuntabilitas Anggaran & Kinerja Instansi
16	Kalimantan Timur	Baik (3,04)	Dasar Pengembangan IKN & Pemerintahan Digital

17	Sumatera Utara	Baik (2,99)	Pembenahan Manajemen Data dan Keamanan
18	Bengkulu	Baik (2,96)	Integrasi Sistem Pengaduan Masyarakat
19	Gorontalo	Baik (2,95)	Efektivitas Layanan Kearsipan Elektronik
20	Kalimantan Selatan	Baik (2,92)	Penguatan Tata Kelola SPBE Sektor Daerah
21	Sulawesi Tengah	Baik (2,85)	Percepatan Pemulihan Layanan Berbasis Digital
22	Aceh	Baik (2,79)	Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel
23	Bangka Belitung	Baik (2,74)	Efisiensi Biaya Operasional Birokrasi
24	Lampung	Baik (2,71)	Peningkatan Layanan Perizinan Online
25	Kalimantan Tengah	Baik (2,63)	Dasar Perencanaan Investasi Teknologi
26	Nusa Tenggara Timur	Baik (2,62)	Pemerataan Kualitas Layanan Pemerintah
27	Maluku Utara	Baik (2,61)	Pengembangan Keamanan Informasi Daerah
28	Sulawesi Utara	Cukup (2,58)	Evaluasi Mandiri Peningkatan Layanan
29	Kalimantan Utara	Cukup (2,55)	Pemantauan Infrastruktur Digital Perbatasan
30	Sulawesi Barat	Cukup (2,52)	Penguatan Struktur Tim Koordinasi SPBE
31	Sulawesi Tenggara	Cukup (2,50)	Pembenahan Kebijakan Tata Kelola Internal

32	Papua	Cukup (2,47)	Penyesuaian Standar Pelayanan Elektronik
33	Maluku	Cukup (2,44)	Rencana Strategis Penyelenggaraan TIK
34	Papua Barat	Cukup (2,38)	Dasar Alokasi Anggaran Transformasi Digital

Sumber : Olah data penulis, 2026

Tabel menampilkan 34 provinsi yang memenuhi kriteria kelengkapan data. Empat provinsi hasil pemekaran (papua selatan, papua tengah, papua pegunungan, dan papua batat daya) tidak disertakan karena data SPBE preode penuh tidak tersedia.

Tabel 1.1 menunjukkan variasi indeks SPBE yang cukup lebar, dari kategori "Memuaskan" hingga "Cukup". Fenomena keberagaman tingkat adopsi digital yang terjadi di tengah persaingan politik dan tuntutan kinerja inilah yang mendasari pentingnya penelitian dilakukan. Adanya perbedaan hasil dari berbagai peneliti terdahulu (*research gap*) menjadi alasan kuat bagi penulis untuk menguji kembali pengaruh variabel-variabel tersebut pada periode terbaru (2018–2024), sekaligus bersamaan dengan dinamika politik nasional yang mencapai puncaknya pada Pilkada Serentak 2024 (Pradipta, 2024).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetisi Politik, kinerja Pemda, Opini Audit Dan Karakteristik Demografi Terhadap E-Government (Studi Pada Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2024)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetisi politik berpengaruh terhadap implementasi *E-Government* pada pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia tahun 2018-2024?
2. Apakah kinerja pemerintah daerah berpengaruh terhadap implementasi *E-Government* pada pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia tahun 2018-2024?
3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *E-Government* pada pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia tahun 2018-2024?
4. Apakah karakteristik demografi berpengaruh terhadap implementasi *E-Government* pada pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia tahun 2018-2024?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian: penelitian ini hanya dilakukan hanya dilakukan pada pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia pemerintah kabupaten dan kota tidak termasuk dalama ruang lingkup penelitian ini.

2. Data yang digunakan adalah laporan tahunan dan data indeks dari tahun 2018 sampai dengan 2024.
3. Penelitian ini dibatasi pada empat variabel saja, yaitu kompetisi politik, kinerja pemerintah daerah, opini audit dan karakteristik demografi.
4. Fokus pengukuran adalah implementasi *E-Government* yang di ukur melalui indeks resmi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah terkait (seperti indeks SPBE

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris untuk mengenai pengaruh kompetisi politik terhadap implementasi *E-Government*?
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris untuk mengenai pengaruh kinerja pemerintah daerah terhadap implementasi *E-Government*?
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh opini audit terhadap implementasi *E-Government*?
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris untuk mengenai pengaruh karakteristik demografi terhadap implementasi *E-Government*

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Memberikan bukti ilmiah tambahan mengenai bagaimana tekanan eksternal (politik) dan internal (kinerja) mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi melalui *e-government*.
2. Menjadi referensi akademik yang memperbarui temuan-temuan terdahulu yang masih inkonsisten, khususnya dalam konteks akselerasi digital pemerintah provinsi periode 2018-2024
3. Sebagai bahan evaluasi strategis untuk memahami faktor-faktor non-teknis (- seperti opini audit dan demografi) yang mempengaruhi transformasi digital, sehingga kebijakan yang diambil biasa lebih tepat sasaran.
4. Memberikan masukan dalam perumusan standar kebijakan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) nasional dengan mempertimbangkan karakteristik dan dinamika politik di tiap provinsi